

## RINGKASAN

Peran pemerintahan desa semakin diperkuat dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Salah satu poin yang paling penting dalam implementasi UU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat (2) tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Pelaksanaan sistem pemerintahan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 menuntut kesiapan yang sangat baik, dengan memperhitungkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, direncanakan, dan pelaksanaan pengawasan secara terus menerus. Permasalahan yang dihadapi adalah potensi desa belum banyak dikelola dengan baik karena rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pemerintah desa yang ada. Pada lain sisi, pelimpahan kewenangan kepada level pemerintahan di bawahnya menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber APBDesa belum mempunyai payung hukum yang jelas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa jauh upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa desa oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Kabupaten Cilacap. Metode kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini karena masih banyak tim pengelola kegiatan dan aparatur desa yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terdiri dari analisis deskriptif kualitatif dan analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package For Sosial Science*) versi 20.00. Analisa data deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan *metode analisis gap*. Untuk identifikasi kapasitas dan kemampuan Tim Pengelola Kegiatan dilakukan dengan menggunakan teknik kuantitatif. Data distribusi frekuensi ini dijadikan sebagai dasar untuk menyusun peta kompetensi terutama yang berhubungan dengan kesenjangan antara kemampuan aktual dan kemampuan ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator yang ada pada aspek pemahaman terhadap uraian

kerja Pengadaan Barang/Jasa bedistribusi pada kuadran prioritas rendah meliputi: pemahaman tentang perencanaan dan realisasi, pelaksanaan tugas pokok, pemahaman tentang manajemen waktu, pemahaman terhadap tata nilai dan kearifan lokal hasil pengadaan. Kinerja tim pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Cilacap dalam tingkatan yang sangat baik. Indikator-indikator yang ada pada aspek kinerja Pengadaan Barang/Jasa kuadran prioritas utama yaitu kecepatan penyelesaian kerja administratif. Sedangkan indikator yang lain berdistribusi pada kuadran prioritas rendah meliputi: pengembangan teknik kerja, kecepatan penyelesaian kerja teknis, kerjasama lintas bagian, kemandirian dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, hasil penelitian juga menjelaskan bahwa kinerja tim pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Cilacap dalam tingkatan yang baik. Berdasarkan analisis diagram karetsius dapat dilihat bahwa indikator-indikator yang ada pada aspek pencegahan korupsi Pengadaan Barang/Jasa kuadran prioritas utama terdiri dari pencegahan terjadinya fraud dan pengawasan internal. Sedangkan indikator yang lain berdistribusi pada kuadran prioritas rendah yaitu pengawasan eksternal, prioritas untuk mempertahankan prestasi meliputi: aspek kewajaran harga dan pengelolaan keuangan pribadi. Pada kuadran tingkat kepentingan rendah tetapi sudah sudah dilaksanakan dengan baik adalah pencegahan korupsi terkait dengan pemangkasan birokrasi, independensi dari intervensi kelompok, kepentingan politik, penerapan gaya hidup, dan pencegahan pengaruh orang-orang terdekat.

Kata Kunci: Kinerja, Pencegahan Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Desa.

## SUMMARY

The role of village government is strengthened by the enactment of Law Number 6 Year 2014 About the Village. Implementation of autonomy for the village will be a force for the village administration to administer, manage and administer its own household, while also increasing the burden of village responsibilities and responsibilities. One of the most important points in implementing the Village Law is related to the budget allocation for the village, in the elucidation of Article 72 Paragraph (2) on Village Finance. The amount of direct budget allocations to the village, set at 10 percent from and outside the regional transfer fund. Implementation of village governance system in accordance with Law no. 6 of 2014 demands excellent readiness, taking into account various matters relating to the implementation of village governance, planned, and ongoing supervision. The problem faced is the potential of the village has not been managed very well because of the low quality and quantity of human resources of existing village government. On the other hand, the delegation of authority to the level of government under it becomes an opportunity for corruption. Governance of procurement of goods / services financed by the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) needs to be improved to conform to the principles of efficient, effective, transparent, community empowerment, mutual assistance, and accountability and adapted to the socio-cultural conditions of local communities. Procurement of Goods / Services in Villages whose financing is sourced from APBDesa does not have a clear legal umbrella. The problem studied in this research is how far the effort of preventing corruption in the implementation of procurement of goods / services of the village by the Activity Management Team (TPK) in Cilacap Regency. Quantitative method, that is research which is used to research at certain population or sample by using research instrument to collect data, data analysis is quantitative / statistic with purpose to test hypothesis which have been determined. The type of research used is descriptive type, that is research that aims to describe the problems studied. This research was conducted in Cilacap Regency, consideration in the selection of this location because there are still many managing team of activity and village apparatus which do not have adequate capability in village fund management. Data collection techniques used questionnaires and documentation. Data analysis techniques used to answer the research problems consist of qualitative descriptive analysis and analysis. The data analysis was done using SPSS (Statistical Package For Social Science) version 20.00. Descriptive data analysis conducted by using gap analysis method. To identify the capacity and capability of the Activity Management Team is done by using quantitative techniques. This frequency distribution data is used as the basis for compiling competency maps, especially those related to the gap between the actual ability and the ideal ability. The results of the research indicate that the indicators that exist on the aspect of understanding of the job description of the procurement of goods / services *besdistribusi* in the low priority quadrant include: understanding of the planning and realization, the

implementation of the main tasks, the understanding of time management, understanding of the values and local wisdom of procurement .The performance of the procurement management team of goods / services activities in Cilacap Regency is very good. Indicators in the Performance aspect Procurement of Goods / Service Quadrant. Main priority is the speed of completion of administrative work. While other indicators distributed in the low priority quadrant include: the development of work techniques, the speed of technical work completion, cooperation cross section, independence in carrying out the task. Furthermore, the results of the study also explained that the performance of the procurement management team of goods / services activities in Cilacap Regency in a good level. Based on rubbersius diagram analysis, it can be seen that the existing indicators on corruption prevention aspects Procurement of Goods / Services of the main priority quadrant consists of prevention of fraud and internal control. While other indicators are distributed in the low-priority quadrant of external supervision, the priority to maintain performance includes: price fairness aspect and personal financial management. In the low-interest but well-implemented quadrant is the prevention of corruption associated with bureaucratic cuts, the independence of group intervention, political interests, lifestyle adoption, and prevention of the influence of the people closest to it.

Keywords: Performance, Prevention of Corruption, Procurement of Village Goods and Services.

